



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202218405, 17 Maret 2022

Pencipta

Nama : **Sayekti Winarsih dan Dr. Susanti, M.Si**
Alamat : RT/RW 02/04 Ds. Karangsono Kec. Kwadungan Kab. Ngawi, Ngawi
, JAWA TIMUR, 63283
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **LPPM-Universitas Negeri Surabaya**
Alamat : Gedung Rektorat Kantor LPPM, Lantai 6, Kampus Universitas
Negeri Surabaya, Lidah Wetan Surabaya, 60213 , Surabaya , JAWA
TIMUR, 60213
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Karya Tulis Lainnya**
Judul Ciptaan : **Lembar Kegiatan Peserta Didik Praktikum Akuntansi
Lembaga/Instansi Pemerintahan Kelas XII SMK Akuntansi
Semester 1**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk : 14 Juni 2021, di Surabaya
pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar
wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70
(tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung
mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000333786

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK
PRAKTIKUM AKUNTANSI LEMBAGA/INSTANSI PEMERINTAHAN
KELAS XII SMK AKUNTANSI SEMESTER 1**



NAMA :

NO. ABSEN :

KELAS :

PRAKTIKUM AKUNTANSI LEMBAGA/INSTANSI PEMERINTAHAN

Untuk Kelas XII SMK Akuntansi Keuangan dan Lembaga Semester Gasal

Penulis :

Sayekti Winarsih

Penelaah:

Materi

1. Dra. Susanti, S.Pd., M.Si
2. Dra. Sumiatun

Bahasa

Dr. Ririe Rengganis, SS, M.Hum

Grafis

Khusnul Khotimah, S.Pd., M.Pd.

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang diberikan sehingga Lembar Kegiatan Peserta Didik ini dapat terselesaikan dengan baik. Keterampilan peserta didik baik dalam bentuk *soft skill* maupun *hard skill* sangat dibutuhkan terlebih di era revolusi industri 4.0 abad 21 ini. Seseorang yang memiliki pengetahuan lebih serta keterampilan dalam bidang yang dimiliki akan menambah penilaian baik kepada seseorang tersebut. Untuk itu, kami menyajikan LKPD ini sebagai usaha sumbang sih terhadap dunia pendidikan dan membantu pewarisan serta proses pengembangan budaya, karakter, dan literasi peserta didik.

Diharapkan dengan adanya LKPD yang disusun berdasarkan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan bidang Akuntansi di abad 21 ini, peserta didik lebih dapat belajar sedikit demi sedikit ununtuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta karakter khususnya dibidang akuntansi lembaga dan instansi pemerintahan.

Selamat belajar dan semoga sukses selalu diberikan kepada kita semua. Aamiin.

Penulis

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Kompetensi Inti

3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Akuntansi dan Keuangan Lembaga pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional.
4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.

Kompetensi Inti

- 3.11. Menganalisis transaksi akuntansi kewajiban satker, dan akuntansi kewajiban desa/kelurahan.
- 3.12. Menganalisis transaksi dokumen sumberakuntansi ekuitas dana satker, dan dokumen sumber akuntansi ekuitas dana desa/kelurahan.
- 3.13. Menganalisis transaksi akuntansi koreksi kesalahan, peristiwa luar biasa, dokumen sumber yang digunakan satker, dan di desakelurahan
- 4.11. Melakukan pencatatan akuntansi kewajiban satker, dan akuntansi kewajiban desa/kelurahan.
- 4.12. Melakukan pencatatan dokumen sumber akuntansi ekuitas dana satker, dan dokumen sumber akuntansi ekuitas dana desa/kelurahan.
- 4.13. Melakukan pencatatan akuntansi koreksi kesalahan, peristiwa luar biasa, dokumen sumber yang digunakan di satker, dan di desa/kelurahan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar	iii
Daftar Isi	iv
Tujuan Pembelajaran Semester	v
BAB 1 Akuntansi Kewajiban	1
A. Pengertian akuntansi Kewajiban	1
B. Macam-macam akuntansi kewajiban	2
C. Perlakuan akuntansi kewajiban	3
D. Kegiatan 1 peserta didik	6
E. Kegiatan 2 peserta didik	9
BAB 2 Akuntansi Ekuitas Dana	19
A. Pengertian akuntansi ekuitas dana	20
B. Perlakuan akuntansi ekuitas dana	21
C. Kegiatan 1 peserta didik.....	24
D. Kegiatan 2 peserta didik.....	27
BAB 3 Akuntansi Koreksi Kesalahan dan Kesalahan Fiskal	35
A. Ruang lingkup akuntansi koreksi kesalahan	36
B. Perlakuan akuntansi koreksi kesalahan	37
C. Kebijakan peristiwa luar biasa	40
D. Kegiatan 1 peserta didik	41
E. Kegiatan 2 peserta didik	44
Daftar Pustaka	51
Identitas penulis	52

Tujuan Pembelajaran Semester

Setelah mempelajari Lembar Kegiatan Peserta Didik, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menganalisis transaksi-transaksi dan dokumen sumber yang berkaitan dengan akuntansi kewajiban pada satker dan desa/kelurahan.
2. Melakukan pencatatan transaksi akuntansi kewajiban pada satker dan desa/kelurahan.
3. Memahami transaksi-transaksi dan dokumen sumber yang berkaitan dengan akuntansi ekuitas dana satker dan desa/kelurahan.
4. Menyusun jurnal akuntansi ekuitas dana satker dan desa/kelurahan.
5. Menjelaskan transaksi-transaksi akuntansi koreksi kesalahan dan peristiwa luar biasa yang terjadi dalam satker dan/atau desa/kelurahan.
6. Melakukan pencatatan transaksi akuntansi koreksi kesalahan dan peristiwa luar biasa yang terjadi dalam satker dan/atau desa/kelurahan.

BAB 1

Akuntansi Kewajiban Satuan Kerja Dan Pemerintah Desa

PETA KONSEP



Pengertian Akuntansi Kewajiban

Macam-macam akuntansi kewajiban

Perlakuan Akuntansi Kewajiban

A. Pengertian Akuntansi

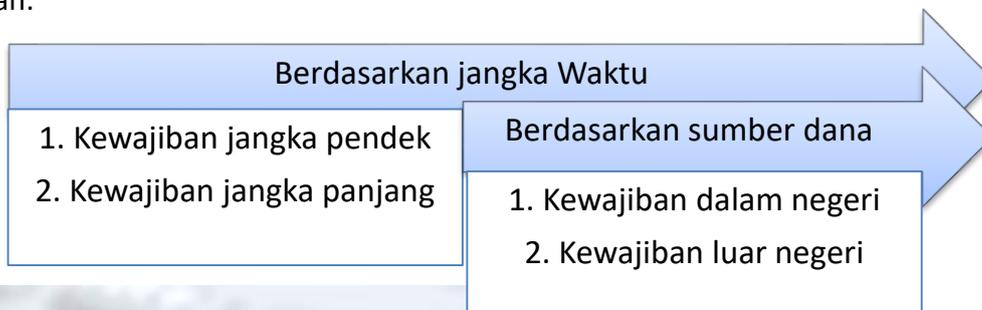
Akuntansi secara umum merupakan suatu kegiatan mencatat, menggolongkan, hingga melaporkan segala bentuk informasi tentang keuangan dalam lembaga maupun instansi kepada para pengguna informasi keuangan yang membutuhkan. Sedangkan menurut *American Institute of Certified Public Accounting*, akuntansi merupakan suatu seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara dan ukuran moneter tertentu, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk juga menafsirkan hasil-hasilnya. Hampir keseluruhan bidang membutuhkan akuntansi dalam mengelola keuangan mereka tak terkecuali instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Dalam pemerintahan daerah terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang juga membutuhkan akuntansi dalam mengelola serta melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditentukan. Dalam penerapannya, keuangan pemerintah daerah terdiri atas aliran masuk dan aliran keluar. Beberapa aliran masuk salah satunya bersumber dari kewajiban yang nantinya akan mengakibatkan aliran dana keluar ketika sudah memasuki jangka waktu yang telah ditentukan.

Kewajiban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP 09 tentang Kewajiban ialah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi pemerintahan. Kewajiban dalam pemerintahan biasanya terjadi karena adanya pengadaan atau pembelian barang dan jasa atau gaji yang belum dapat dibayarkan pada saat transaksi terjadi, pinjaman yang dilakukan dengan lembaga internasional seperti Bank Dunia, serta pinjaman yang diperoleh dari pemerintah lain maupun lembaga dalam negeri. Pada kenyataannya pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan baik yang menyangkut kegiatan operasional maupun nonoperasional yang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat dengan APBN saja, sehingga dibutuhkannya suatu pinjaman dalam menunjang kegiatan tersebut yang menimbulkan kewajiban dalam membayarnya di masa yang akan datang. Kewajiban yang ditanggung oleh pemerintah daerah maupun desa pada dasarnya ialah kewajiban dalam mempertanggungjawabkan ekuitas dana atau keuangannya kepada lembaga maupun orang-orang yang berkepentingan di dalam kegiatan yang dilakukan secara sah seperti Pemerintah Pusat, DPRD, dan masyarakat umum. Unsur-unsur penting dalam mempertanggungjawabkan kewajiban diantaranya mencakup keabsahan yang merupakan tata cara efektif untuk menjaga kekayaan keuangan dan barang serta mencegah terjadinya penyelewengan maupun kecurangan..

Dari kedua penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi kewajiban dalam pemerintahan merupakan suatu kegiatan mencatat, menggolongkan, dan melaporkan segala bentuk kewajiban yang mengakibatkan aliran kas keluar dari sumber daya ekonomi pemerintahan yang telah dilakukan. Selain itu akuntansi kewajiban juga meliputi pengakuan, pengukuran, pelaporan serta pengungkapan secara keseluruhan transaksi kewajiban yang mengakibatkan terjadinya pembayaran di masa yang akan datang baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang, termasuk perlakuan atas restrukturisasi utang, penghapusan utang, dan kapitalisasi biaya pinjaman dalam menjalankan kegiatannya.

B. Macam-macam Kewajiban

Kewajiban dalam pemerintahan dibagi menjadi beberapa macam. Diantaranya dibagi berdasarkan jangka waktu dan sumber dana atau dari mana pinjaman tersebut diperoleh. Berikut beberapa macam kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual 09 tentang Kewajiban yang terdapat dalam pemerintahan:



Gambar 1. Jenis-jenis kewajiban berdasarkan PSAP Berbasis Akrual 09

Secara umum kewajiban yang terdapat dalam pemerintahan baik satuan kerja maupun pemerintahan desa berdasarkan waktunya sama dengan kewajiban yang terdapat dalam suatu perusahaan. Kewajiban jangka pendek merupakan suatu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam kurun waktu kurang dari sama dengan 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dalam pemerintahan dapat berupa utang transfer pemerintah, utang pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Namun, terdapat utang yang akan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan kemudian diklasifikasikan dalam kewajiban jangka panjang apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Jangka waktu pembayaran aslinya adalah lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinancing*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang.
- Adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangandisetujui.

Jenis kewajiban lainnya berdasarkan sumber dana terdapat kewajiban dalam negeri dan kewajiban luar negeri. Kewajiban yang bersumber dari dalam negeri misalnya pinjaman obligasi, pinjaman dari pemerintah maupun satuan kerja lainnya yang masih dalam satu wilayah kerja. Sedangkan kewajiban yang bersumber dari luar negeri akan disajikan dalam pos utang luar negeri seperti pinjaman lembaga internasional. Selain yang telah disebutkan sebelumnya, kewajiban pemerintah dapat juga terjadi akibat kewajiban kepada masyarakat alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lain maupun pemberi jasa lainnya. Pada dasarnya kewajiban pemerintah baik satuan kerja maupun pemerintah desa bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturanperundang-undangan yang berlaku.

C. Perlakuan Akuntansi Kewajiban

1. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban pemerintah diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan kewajiban tersebut dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari beberapa hal berikut;

- a. Transaksi penukaran (*exchange transactions*);
- b. Transaksi tanpa penukaran (*non-exchange transaction*), dimana pemerintah belum melaksanakan kewajibannya sampai akhir periode akuntansi;
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-relate events*) dan;
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledge events*).

Selain keempat hal di atas, terdapat pula kewajiban pemerintah yang timbul selain didasarkan pada transaksi namun berdasarkan interaksi yang terjadi antara pemerintah dengan lingkungannya. Misalnya, pemerintah melakukan suatu kegiatan dan secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menimbulkan kewajiban. Kewajiban tersebut dapat dilaporkan dalam neraca sepanjang hukum yang berlaku memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal.



Gambar 1. Bencana alam banjir yang terjadi pada tahun 2019 di Jakarta mengakibatkan puluhan rumah warga rusak dan roboh.

Kejadian di samping merupakan salah satu contoh kewajiban yang timbul akibat interaksi secara tidak langsung antara pemerintah dengan lingkungan. Pemerintah dapat mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi di samping apabila memenuhi syarat-syarat seperti berikut ini;

- (1) DPR / DPRD telah mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan.
- (2) Transaksi dengan pert.ukaran timbul (misalnya saat kontraktor belum melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (pembayaran langsung kepada korban bencana alam).

2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dan penjabarannya menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

a. Utang dalam negeri jangka pendek

1) Utang kepada pihak ketiga

Utang kepada pihak ketiga merupakan utang pemerintah yang timbul diakibatkan adanya pengadaan barang/jasa yang berasal dari SPM-LS hingga sampai pada tanggal pelaporan belum dibayarkan.

- Contoh : Dibeli 5 unit komputer tiga bagian unit kerja seharga @Rp6.500.000,- secara kredit menggunakan dana yang SPM-LS.

✚ Jurnal yang dibuat :

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XX	Aset tetap	Rp32.500.000	
XX	Utang kepada pihak ketiga		Rp32.500.000

2) Utang bunga

Utang bunga timbul dikarenakan pemerintah memiliki utang jangka pendek yang dengannya menimbulkan biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pihak terkait. Salah satu contoh utang bunga adalah *commitment fee*. *Commitment fee* merupakan utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur namun belum ditarik oleh debitur.

- Contoh : Diterima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp70.000.000 dengan bunga pinjaman 10% yang akan dibayarkan dua kali dalam sebulan.

✚ Jurnal pencatatan utang bunga:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XX	Beban bunga	Rp3.500.000	
XX	Utang bunga		Rp3.500.000

3) Utang perhitungan pihak ketiga

Utang perhitungan pihak ketiga menurut PSAP 09 paragraf 5 adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintahan sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran BPJS Kesehatan, taspens dan bapetarum.

- Contoh : gaji pegawai bulan Maret yang semestinya dibayarkan di awal bulan sebesar Rp3.200.000 baru dibayarkan di minggu ketiga bulan Maret 2020. Dari pembayaran gaji tersebut dikenakan PPh Pasal 21 sebesar Rp304.000.

✚ Jurnal saat pembayaran gaji dan pemotongan PFK

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XX	Beban gaji pegawai	Rp.3.200.000	
XX	Utang beban pegawai		Rp3.200.000
XX	Utang beban pegawai	Rp3.200.000	
XX	Kas lainnya	Rp304.000	
XX	Kas		Rp3.200.000
XX	Utang PFK		Rp304.000

✚ Jurnal saat pembayaran PFK

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XX	Utang PFK	Rp304.000	
XX	Kas lainnya		Rp304.000

4) Pendapatan diterima di muka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun pendapatan diterima di muka senilai kas yang telah diterima, namun samai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

- Contoh : Dinas K3LH Kota Madiun akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat uang senilai Rp45.000.000 untuk pengembangan lingkungan namun akan diterima di periode neraca selanjutnya.

✚ Jurnal pada saat kas diterima

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XX	Kas	Rp45.000.000	
XX	Pendapatan-LO		Rp45.000.000

✚ Jurnal pada saat pengakuan pendapatan diterima di muka pada akhir periode

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XX	Pendapatan-LO	Rp45.000.000	
XX	Pendapatan diterima di muka		Rp45.000.000

5) Uang muka dari kas umum negara/daerah

Uang muka dari kas umum negara/daerah merupakan utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran kementerian/lembaga/SKPD belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh BUN/BUD sebagai uang muka kerja sampai pada tanggal neraca. Sedangkan untuk Pemda, sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, sudah tidak diakui lagi uang muka dari kas umum daerah. Dalam hal ini, uang muka dari KUD diakui sebagai transaksi *home office* dan *branch office*, sehingga SKPD tidak mencatat uang muka dari KUD, dan dicatat pada akun RK-PPKD.

Kegiatan 1 Peserta Didik

1. Studi Kasus

Pemerintah Desa Karangsono yang berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur telah menggunakan sisa dana desa sebesar Rp250.000.000 untuk disalurkan kepada 400 kepala keluarga sebagai bantuan langsung tunai dana desa akibat pandemi *Covid-19* pada tanggal 16 Mei 2020 lalu. Hal ini termasuk dalam kejadian penting dan mendesak sehingga diperbolehkan untuk meminjam anggaran lain dalam memenuhi kejadian yang diprioritaskan. Padahal sisa dana desa tersebut sebenarnya sudah dialokasikan untuk pembangunan jalan desa sepanjang 20 km. Akibat adanya pengalihan anggaran maka pembangunan jalan desa menjadi terhambat. Perlu adanya pengajuan ulang dana desa untuk melanjutkan pembangunan jalan desa sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Diminta:

- a. Buatlah skenario akuntansi kewajiban antara pemerintah Desa Karangsono berkaitan dengan pengajuan dana desa yang telah dipinjam untuk alokasi BLT-DD *Covid-19* kepada pemerintah Kabupaten Ngawi!
- b. Bagaimana pencatatan pendistribusian bantuan langsung tunai dana desa kepada 400 kepala keluarga di Desa Karangsono apabila melalui 2 tahap penyaluran?
- c. Apa yang akan terjadi apabila sisa dana desa tidak mencukupi untuk penyaluran bantuan langsung tunai yang bersifat penting dan mendesak tersebut?

2. Cara pengerjaan

1. Studi kasus di atas merupakan kasus yang dapat diselesaikan dengan kolaborasi kelompok.
2. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang.
3. Jawaban dikerjakan di lembar kegiatan yang telah disediakan untuk masing-masing peserta didik.
4. Hasil kolaborasi kelompok yang telah dikerjakan dalam lembar kegiatan selanjutnya diringkas dan dipresentasikan dalam bentuk *powerpoint* ataupun *mindmapping* di depan kelas bagi setiap kelompok.
5. Kelompok lain dapat memberikan pertanyaan, sanggahan, maupun kritik yang membangun bagi kelompok lain yang sedang mempresentasikan hasil kolaborasi kelompok.

Kegiatan 2 Peserta Didik

A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan memilih satu jawaban yang paling tepat!

1. Dalam akuntansi kewajiban, *commitment fee* merupakan utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak namun belum ditarik oleh ...
 - a. Kreditur
 - b. Nasabah
 - c. *Field excecutor*
 - d. *Saler*
 - e. Akuntan
2. Mandiri *Finance* meminjamkan dana sebesar Rp80.000.000 kepada salah satu satuan kerja satu negara yang membutuhkan dana tersebut untuk pengembangan kegiatan. Utang tersebut akan dilunasi dalam jangka waktu 12 bulan dengan bunga 8% per tahun. Setelah bulan ke-6, Mandiri *Finance* melakukan *refinancing* sebesar 20% dari dana yang dipinjamkan sebelumnya atas permintaan pihak kedua. Berdasarkan PSAP 09 berbasis akrual, utang tersebut termasuk kedalam jenis ...
 - a. Utang jangka panjang
 - b. Utang jangka pendek
 - c. Utang perhitungan pihak kedua
 - d. Utang kepada pihak kedua
 - e. Utang dalam negeri jangka pendek
3. Sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, pos uang muka dari kas umum daerah sudah tidak diakui kembali dalam pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan transaksi *home office* dan *branch office* dicatat dalam rekening ...
 - a. Pendapatan-LO
 - b. Beban-LO
 - c. RK-PPKD
 - d. RK-KUD
 - e. Pendapatan-LRA
4. Utang obligasi daerah disajikan dalam neraca pada pos utang jangka panjang yang dicatat sebesar ...
 - a. Total pokok utang
 - b. Pokok utang ditambah beban bunga
 - c. Pokok utang ditambah bunga premium
 - d. Pokok utang ditambah/dikurangi sisa premium
 - e. Pokok utang dibagi diskon yang belum diamortisasi
5. Pemerintah daerah Kabupaten Madiun melakukan pinjaman dari perbankan dalam negeri sebesar Rp150.000.000,00 dengan bunga pinjaman 12% setahun dan dicicil selama 5 tahun. Pemda Madiun mendapatkan *charge* sebesar 0,12% dari pokok

pinjaman yang diterima. Jurnal untuk mencatat penerimaan pembiayaan tersebut adalah

....

a. Kas	Rp150.000.000,00
Utang	Rp150.000.000,00
b. Kas	Rp143.280.000,00
Pendapatan-LO	Rp143.280.000,00
c. Kas	Rp150.000.000,00
Pendapatan-LO	Rp150.000.000,00
d. Kas	Rp149.820.000,00,00
Utang dalam negeri-perbankan	Rp149.820.000,00
e. Kas	Rp143.280.000,00
Utang dalam negeri-perbankan	Rp143.280.000,00

6. Pada tanggal 1 Oktober 2019 Pemerintah Daerah Bulak Panjang menerima pinjaman dari bank sebesar Rp100.000.000,00 dengan tingkat bunga 2% per tahun dan dibayar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam jangka waktu 5 tahun sejak perjanjian ditandatangani. Jurnal yang dibuat untuk mencatat utang bunga pada akhir tahun 2019 adalah ...

a. Beban bunga	Rp500.000,00
Kas	Rp500.000,00
b. Utang bunga	Rp500.000,00
Kas	Rp500.000,00
c. Utang bunga	Rp1.500.000,00
Beban bunga	Rp1.500.000,00
d. Beban bunga	Rp1.500.000,00
Utang bunga	Rp1.500.000,00
e. Beban bunga	Rp500.000,00
Utang bunga	Rp500.000,00

7. Pada tanggal 28 Juli 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menerima tagihan dari PLN untuk pembayaran langganan daya dan jasa listrik bulan Mei 2019 dan Juni 2019 yang masing-masing sebesar Rp2.587.098,00 dan Rp3.007.890,00. Sampai pda tanggal pelaporan, tagihan tersebut belum terbayarkan. Berdasarkan kejadian tersebut, jurnal yang dibuat adalah ...

a. Utang kepada pihak ketiga	Rp5.987.898,00
Kas	Rp5.987.898,00
b. Utang kepada pihak ketiga	Rp5.456.788,00
Kas	Rp5.456.788,00
c. Beban jasa	Rp5.594.988,00
Utang kepada pihak ketiga	Rp5.594.988,00
d. Beban jasa	Rp5.456.788,00
Utang listrik	Rp5.456.788,00

e. Beban jasa	Rp5.654.877,00
Kas	Rp5.654.877,00

8. Lina selaku akuntan pemerintah desa Karangsono pada tanggal 31 Desember telah melakukan penutupan neraca dengan nominal sebesar Rp45.908.000,00. Sebelum dilaporkan kepada kepala desa, Lina melakukan pengecekan kembali secara fisik dana yang tersedia dan ditemukan selisih sebesar Rp2.400.000,00. Selisih ini tidak dilaporkan dalam koreksi kesalahan dan merubah nominal dalam neraca menjadi Rp43.508.000,00. Dari kejadian tersebut Lina sebagai seorang akuntan tidak mencerminkan asas...

- Pertanggungjawaban
- Akuntabel
- Transparansi
- Up to date*
- Tertib dan disiplin

9. Hal-hal yang dilakukan dalam akuntansi kewajiban meliputi pengakuan, pengukuran, pelaporan, serta pengungkapan penuh transaksi kewajiban yang menimbulkan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dibawah ini yang termasuk utang jangka pendek dalam negeri yang mengandung unsur biaya berupa bunga kecuali...

- SPN
- Utang obligasi
- Utang perbankan
- Uang muka KUN
- Commitment fee*

10. Pada tanggal 27 Agustus 2019 bendahara pengeluaran membayar pengadaan ATK sebesar Rp4.460.000,00 dengan perincian Rp4.000.000,00 untuk rekanan yang bersangkutan, Rp400.000,00 untuk pemotongan PPN dan Rp60.000,00 untuk pemotongan PPh. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 seluruh pemotongan pajak belum disetorkan ke kas negara. Jurnal utang pajak yang harus dibuat pemerintah daerah adalah ...

- | | |
|----------------|--------------|
| a. Beban pajak | Rp460.000,00 |
| Utang pajak | Rp460.000,00 |
| b. Beban pajak | Rp460.000,00 |
| Kas | Rp460.000,00 |
| c. Beban PPN | Rp400.000,00 |
| Beban PPh | Rp60.000,00 |
| Utang Pajak | Rp460.000,00 |
| d. Beban PPN | Rp400.000,00 |
| Beban PP | Rp60.000,00 |
| Kas | Rp460.000,00 |
| e. Utang PPN | Rp400.000,00 |
| Utang PPh | Rp60.000,00 |
| Kas | Rp460.000,00 |

11. Berikut yang termasuk tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam akuntansi kewajiban SKPD adalah...
- Menyiapkan dokumen pembelian
 - Menerima barang berdasarkan nota pesanan dibuktikan dengan BSAT
 - Mencatat transaksi investasi lainnya
 - Menyusun laporan realisasi anggaran
 - Menyampaikan dokumen transaksi yang dilakukan dengan mekanisme LS kepada SKPD

12. A. Pengguna Anggaran

B. PPKD

C. Appraisal

D. Kepala daerah

E. PPTK

Pihak-pihak yang terkait dalam akuntansi kewajiban di SKPD adalah ...

- A, B, C
- B,E,D
- C,B,D
- D,C,B
- E,B,A

13. Pada tanggal 7 Mei 2018 SKPD Z menerima ATK dari *supplier* senilai Rp5.000.000,00 yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang. Namun, barang tersebut belum dibayar. Barulah pada tanggal 10 Mei 2018 SKPD Z membayar dengan nomor bukti 30/KK/V/2018 menggunakan mekanisme UP. Jurnal LO yang dibuat oleh akuntan SKPD Z pada saat pembayaran adalah ...

a.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek	Uraian	Debet	Kredit
10 Mei 2018	30/KK/V/2018		Utang belanja bahan habis Pakai	Rp5.000.000	
			Kas di bendahara Pengeluaran		Rp5.000.000

b.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek	Uraian	Debet	Kredit
10 Mei 2018	10/KK/V/2018		Utang belanja bahan habis Pakai	Rp5.000.000	

			Kas di bendahara Pengeluaran		Rp5.000.000
--	--	--	---------------------------------	--	-------------

c.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek	Uraian	Debet	Kredit
10 Mei 2018	30/KK/V/2018		Belanja ATK	Rp5.000.000	
			Kas di bendahara Pengeluaran		Rp5.000.000

d.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek	Uraian	Debet	Kredit
10 Mei 2018	10/KK/V/2018		Utang belanja bahan habis Pakai	Rp5.000.000	
			Perubahan SAL		Rp5.000.000

e.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rek	Uraian	Debet	Kredit
10 Mei 2018	30/KK/V/2018		Beban ATK	Rp5.000.000	
			Kas di bendahara pengeluaran		Rp5.000.000

14. UPT Dinas pendidikan Kecamatan Kwadungan membeli lima buah komputer dengan harga @Rp6.800.000,00 pada tanggal 19 April 2018 secara kredit. Pembayaran baru dilakukan pada tanggal 25 April 2018 setelah SP2D keluar dan menggunakan mekanisme LS. Jurnal yang dibuat pada tanggal 19 April 2018 oleh akuntan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kwadungan dengan menggunakan pendekatan asset adalah ...

- a. Belanja modal-komputer Rp34.000.000,00
Perubahan SAL Rp34.000.000,00
- b. Utang belanja modal-komputer Rp34.000.000,00
RK-PPKD Rp34.000.000,00
- c. Peralatan dan mesin personal komputer Rp34.000.000,00
Utang belanja modal-komputer Rp34.000.000,00
- d. Perubahan SAL Rp34.000.000,00
Utang belanja modal-komputer Rp34.000.000,00
- e. Belanja modal-Komputer Rp34.000.000,00
Utang belanja modal-komputer Rp34.000.000,00

15. Dokumen yang digunakan dalam system akuntansi kewajiban antara lain, kecuali ...
- Nota kredit, BAST, SD2P
 - Nota pesanan, nota debet, SP2D
 - Surat pernyataan PA, faktur, SPDP UP
 - Surat Perjanjian Kerja, BAST, kwitansi
 - Peraturan gubernur, nota debet, BAST
16. Berikut yang termasuk kewajiban jangka pendek non perbankan adalah ...
- Utang obligasi
 - Utang luar negeri
 - Utang jangka panjang lainnya
 - Utang SSB
 - Bagian lancar utang jangka panjang
17. Shania merupakan salah satu PNS yang memiliki tugas menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Ralisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK. Selain itu Shania juga bertanggungjawab dalam melakukan pencatatan transaksi investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke dalam jurnal umum. Jabatan Shania dalam SKPD dengan tuga tersebut adalah ...
- Akuntan Umum-SKPD
 - PPKD
 - PA
 - PPK-SKPD
 - KPA
18. Tanah seluas 200 m² dibeli oleh Pemerintah Desa Rejoso Kabupaten Nganjuk seharga Rp84.000.000,00 untuk keperluan pembangunan gor olahraga desa. Pembeli menandatangani akta utang dengan jangka waktu pembayaran 2 tahun untuk 6 kali angsuran dengan bunga 2% setiap semesternya. Pembayaran angsuran jatuh pada bulan April dan Oktober minggu pertama. Pencatatan pembayaan cicilan anuitas pertama yang harus dilakukan oleh akuntan Pemerintah Desa Rejoso adalah ...
- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a. Utang cicilan | Rp14.000.000,00 |
| Beban bunga | Rp 840.000,00 |
| Kas | Rp14.820.000,00 |
| b. Utang cicilan | Rp14.000.000,00 |
| Kas | Rp14.000.000,00 |
| c. Aset-Tanah | Rp14.840.000,00 |
| Utang | Rp14.840.000 |
| d. Utang bunga anuitas | Rp14.840.000,00 |
| Kas | Rp14.840.000,00 |
| e. Utang bunga anuitas | Rp14.000.000,00 |
| Beban bunga | Rp840.000,00 |
| Kas di bendahara pengeluaran | Rp14.840.000,00 |

19.

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
Xxx	Beban pegawai	Rp4.800.000,00	
Xxx	Utang beban pegawai		Rp4.800.000,00
Xxx	Utang beban pegawai	Rp4.800.000,00	
Xxx	Kas lainnya	Rp480.000,00	
Xxx	Kas		Rp4.800.000,00
Xxx	Utang PFK		Rp480.000,00

Tina selaku akuntan salah satu satuan kerja di Kabupaten Ngawi melakukan pencatatan seperti yang terlihat pada jurnal di atas. Transaksi yang dicatat Tina dalam jurnal tersebut merupakan transaksi ...

- Pembayaran gaji pegawai
- Pembayaran gaji disertai pemotongan PFK
- Pembayaran PFK disertai pemotongan pajak penghasilan
- Pembayaran utang gaji pegawai
- Pembayaran utang gaji disertai pemotongan pajak

20. Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun melakukan pinjaman dalam negeri sebesar Rp75.000.000,00. Pinjaman ini akan dicicil selama 3 tahun dengan bunga tunggal sebesar 10%. Jurnal untuk mencatat penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman perbankan tersebut adalah ...

- | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| a. Kas | Rp75.000.000,00 | |
| Utang perbankan | | Rp75.000.000,00 |
| b. Kas | Rp82.500.000,00 | |
| Utang perbankan | | Rp82.500.00,00 |
| c. Kas | Rp75.000.000,00 | |
| Utang dalam negeri | | Rp75.000.000,00 |
| d. Kas | Rp82.500.000,00 | |
| Utang dalam negeri- perbankan | | Rp82.500.000,00 |
| e. Kas | Rp75.000.000,00 | |
| Utang dalam negeri-perbankan | | Rp75.000.000,00 |

B. Susunlah jurnal yang tepat untuk transaksi-transaksi kewajiban di bawah ini!

Tgl 03 Juni 2019 Diterima pinjaman dari Bank BRI sebesar Rp1000.000.000,00 dengan bunga 8% per tahun dan dibayar 2 kali dalam satu tahun selama 5 tahun. Untuk digunakan sebagai dana kegiatan Pemerintah Desa Budug.

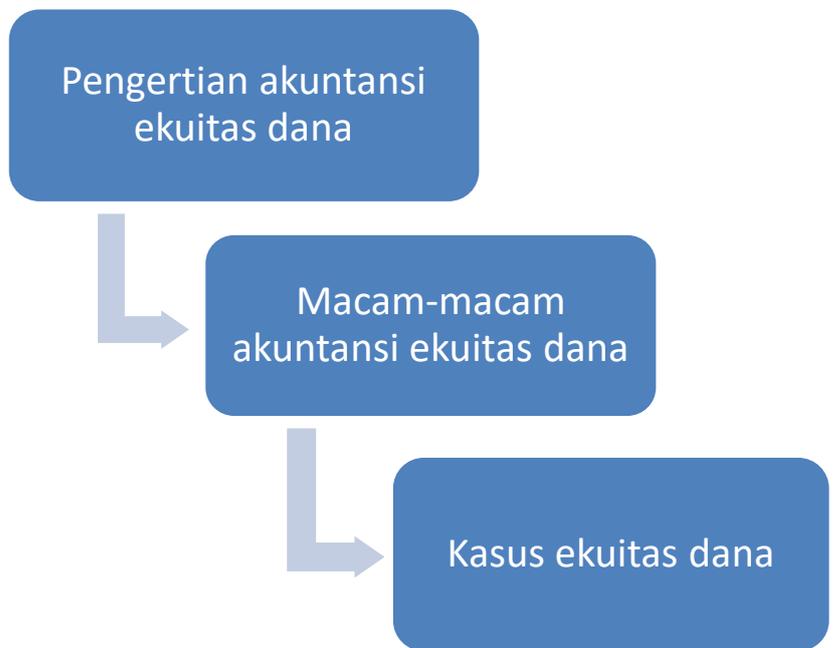
- Tgl 08 Juni 2019 Dibeli alat tulis kantor sebesar Rp2.786.000,00 menggunakan mekanisme LS.
- Tgl 10 Juni 2019 Diperoleh tagihan listrik bulan Mei sebesar Rp870.000,00
- Tgl 12 Juni 2019 Dibayar gaji pegawai sebesar Rp5.280.000,00 sudah termasuk pemotongan pajak penghasilan 12%. Pajak penghasilan akan dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2019 mendatang.
- Tgl 14 Juni 2019 Dibeli secara kredit 2 buah komputer seharga @ Rp7.250.000 dan PPN 10% untuk total pembelian menggunakan UP.
- Tgl 15 Juni 2019 Membayar cicilan utang atas pembelian tanah bulan Desember tahun 2017 untuk keperluan pembangunan mushola kantor desa sebesar Rp 25.000.000,00 dan bunga sebesar 9% dari pokok cicilan utang setiap tahunnya.
- Tgl 18 Juni 2019 Diterima restrukturisasi utang luar negeri sebagai bagian lancer utang jangka panjang senilai Rp39.560.000,00. Jangka waktu jatuh tempo sampai dengan 18 Juni 2020.
- Tgl 20 Juni 2019 Diterima tagihan air dan telepon untuk bulan Juni 2019 senilai masing masing Rp500.000,00 dan Rp800.000,00 sampai dengan waktu pelaporan belum terselesaikan.
- Tgl 21 Juni 2019 Dibayar gaji pegawai sebesar Rp5.950.000,00 sudah termasuk pemotongan pajak penghasilan 15%. Pajak penghasilan akan dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2019 mendatang.
- Tgl 24 Juni 2019 Dibayarkan kepada pemerintah atas utang pajak penghasilan

SABAR.

Kerja kerasmu akan terbayar dengan hasil yang memuaskan

Akuntansi Ekuitas Dana

PETA KONSEP



A. Akuntansi Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang diperoleh dari selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dan dalam pemerintahan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu, ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, serta ekuitas dana cadangan. Berikut penjelasan masing-masing kelompok tersebut.

1. Ekuitas dana lancar

Ekuitas dana lancar merupakan hasil selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas dana lancar terdiri dari :

- a. Saldo Anggaran Lebih (SAL).
- b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
- c. Pendapatan yang ditangguhkan.
- d. Cadangan piutang.
- e. Cadangan persediaan.
- f. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

2. Ekuitas dana investasi

Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Yang termasuk ekuitas dana investasi antara lain:

- a. Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.
- b. Diinvestasikan dalam aset tetap.
- c. Diinvestasikan dalam aset lainnya (tidak termasuk dan acadangan).
- d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.

3. Ekuitas dana cadangan

Ekuitas dana cadangan adalah kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan. Akun ekuitas dana cadangan merupakan akun lawan dari dana cadangan.

Akuntansi atas ekuitas dana terjadi bersamaan dengan akuntansi atas transaksi belanja modal, penjualan aset tetap, dan pembiayaan, serta penyesuaian (khususnya piutang, persediaan, dan depresiasi). Hal ini dikarenakan perubahan yang terjadi pada akun ekuitas dana disebabkan oleh transaksi-transaksi serta penyesuaian di akhir periode akuntansi.

1) Dokumen sumber ekuitas dana

No	Jenis Transaksi	Dokumen Sumber
1.	Ekuitas dana lancar –SiLPA	• LRA
2.	Ekuitas dana lancar-Cadangan piutang	• SKP/SKR yang belum dibayar • Surat perjanjian pemberian pinjaman • Bukti transfer

3.	Ekuitas dana lancar - Cadangan persediaan	• Berita acara hasil investasi fisik
4.	Ekuitas dana lancar – Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	• Surat perjanjian pinjaman dana (SP2D) utang
5.	Ekuitas dana investasi – Diinvestasikan dalam jangka panjang	• SP2D • Kopi surat perintah pemindahbukuan
6.	Ekuitas dana investasi – Diinvestasikan dalam asset tetap	• BASTB • Surat keputusan dum
7.	Ekuitas dana investasi – Diinvestasikan dalam asset lainnya	• Surat keputusan penempatan • SP2D
8.	Ekuitas dana investasi – Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	• Surat perjanjian pinjaman • SP2D
9.	Ekuitas cadangan – Diinvestasikan dalam dana cadangan	• Perda tentang dana cadangan • SP2D

2) Pencatatan ekuitas dana

a) Cadangan piutang

(1) Untuk transaksi yang berasal dari penyesuaian atas timbulnya pendapatan di akhir periode akuntansi.

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Piutang	Rpxxx	
	Ekuitas dana lancar- Cadangan piutang		Rpxxx

(2) Untuk transaksi yang berasal dari pembiayaan.

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Ekuitas dana lancar- Cadangan piutang	Rpxxx	
	Piutang		Rpxxx

b) Cadangan persediaan

Penjurnalan transaksi dari penyesuaian atas inventarisasi fisik persediaan sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Persediaan	Rpxxx	
	Ekuitas dana lancar – Cadangan persediaan		Rpxxx

c) Investasi jangka panjang

(1) Pencatatan transaksi pengeluaran pembiayaan, yaitu:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Penyertaan modal pemerintah daerah	Rpxxx	
	Ekuitas dana investasi- diinvestasikan dalam investasi jangka panjang		Rpxxx

(2) Pencatatan transaksi penerimaan pembiayaan, yaitu:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Ekuitas dana investasi- diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	Rpxxx	
	Penyertaan modal pemerintah daerah		Rpxxx

d) Aset tetap

(1) Pencatatan transaksi belanja modal di PPKD/BUD, perolehan aset tetap sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Aset tetap	Rpxxx	
	Ekuitas dana investasi – diinvestasikan dalam aset tetap		Rpxxx

(2) Pencatatan transaksi pendapatan (penjualan aset tetap daerah daerah yang tidak dipisahkan) sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Ekuitas dana investasi- diinvestasikan dalam aset tetap	Rpxxx	
	Aset tetap		Rpxxx

(3) Pencatatan penyesuaian aset tetap(depresiasi) sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Ekuitas dana investasi- diinvestasikan dalam aset tetap	Rpxxx	
	Akumulasi depresiasi		Rpxxx

e) Asset lainnya

(1) Pencatatan untuk transaksi belanja modal perolehan asset lainnya sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Aset lainnya	Rpxxx	
	Ekuitas dana investasi – Diinvestasikan dalam asset lainnya		Rpxxx

(2) Pencatatan transaksi pendapatan (penjualan aset lainnya daerah yang tidak dipisahkan) sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Ekuitas dana investasi – Diinvestasikan dalam asset lainnya	Rpxxx	
	Aset lainnya		Rpxxx

f) Ekuitas dana cadangan

(1) Pencatatan transaksi pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan) yaitu:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Dana cadangan	Rpxxx	
	Ekuitas dana investasi – Diinvestasikan dalam dana cadangan		Rpxxx

(2) Pencatatan transaksi penerimaan pembiayaan (pencairan dana cadangan) yaitu :

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Ekuitas dana investasi – Diinvestasikan dalam asset lainnya	Rpxxx	
	Dana cadangan		Rpxxx

PERCAYALAH.

Tuhanmu akan selalu membantumu

Kegiatan 1 Peserta Didik

1. Tugas Kelompok

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan tugasnya membutuhkan penganggaran dana untuk melaksanakan kegiatan operasional SKPD tersebut. Dalam hal menganggarkan dana, ada anggaran terkait belanja dan pendapatan dan tak terkecuali perihal ekuitas. Buatlah kelompok dengan teman sekelasmu dan kunjungi salah satu SKPD di bawah ini yang ada di daerah kalian untuk mendapatkan pengetahuan tentang ekuitas dana dalam SKPD!

Diminta:

- a. Catatlah semua transaksi yang berkaitan dengan ekuitas dana dalam SKPD yang kalian kunjungi!
- b. Buatlah pencatatan dalam jurnal yang telah disediakan dalam LKPD!
- c. Analisislah apa yang akan terjadi apabila salah satu transaksi tersebut tidak memiliki dokumen sumber yang relevan!
- d. Bagaimana perbedaan antara konsep yang kalian terima di kelas dengan kenyataan akuntansi ekuitas dana di SKPD yang kalian kunjungi?
- e. Presentasikan hasil rangkuman tugas kelompok ini di depan kelas!

Berikut pilihan SKPD yang dapat kalian kunjungi:

- ❖ Dinas Kesehatan
- ❖ Dinas Pendidikan
- ❖ Dinas Pertanian
- ❖ Dinas Pendapatan
- ❖ Dinas K3LH

2. Cara Pengerjaan

1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 5-6 anak!
2. Pilihlah salah satu SKPD yang telah disediakan untuk dikunjungi oleh masing-masing kelompok!
3. Bawalah perlengkapan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting sesuai dengan tugas yang diterima!
4. Hasil diskusi kelompok dikerjakan dalam format yang telah disediakan.
5. Hasil kolaborasi kelompok yang telah dikerjakan dalam lembar kegiatan selanjutnya diringkas dan dipresentasikan dalam bentuk *powerpoint* ataupun *mindmapping* di depan kelas bagi setiap kelompok.
6. Kelompok lain dapat memberikan pertanyaan, sanggahan, maupun kritik yang membangun bagi kelompok lain yang sedang mempresentasikan hasil kolaborasi kelompok.

Kegiatan 2 Peserta Didik

A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan memilih satu jawaban yang paling tepat!

1. Dalam ekuitas dana lancar terdapat akun SAL dan SiLPA yang merupakan akun kontra untuk menampung kas dan setara kas serta ...
 - a. Piutang
 - b. Investasi jangka pendek
 - c. Investasi jangka panjang
 - d. Persediaan barang dagang
 - e. Barang modal
2. Tuan Abidin menerima SP2D pengalokasian dana yang harus disediakan untuk utang jangka panjang oleh pemerintah pusat. Dana yang harus disediakan untuk utang jangka panjang ini termasuk ke dalam pos ekuitas dana investasi yang merupakan akun lawan dari ...
 - a. Seluruh utang jangka panjang
 - b. *Incredible asset*
 - c. *Short term bills*
 - d. Seluruh utang jangka pendek
 - e. *Credible asset*
3. Laporan realisasi anggaran atau LRA merupakan dokumen sumber untuk kelompok ekuitas dana Inacar pos bagian ...
 - a. Saldo Lebih Anggaran
 - b. Cadangan piutang
 - c. Cadangan persediaan
 - d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
 - e. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek
4.

1. SP2D	4. Kopi surat pemindahbukuan
2. BAST barang	5. Perda tentang dana cadangan
3. LRA	6. SKP yang belum dibayar

Dari beberapa dokumen sumber di atas, yang merupakan dokumen sumber untuk transaksi yang berkaitan dengan ekuitas dana investadi pos diinvestasikan dalam investasi jangka panjang adalah ...

 - a. 1 dan 6
 - b. 2 dan 5
 - c. 3 dan 4
 - d. 4 dan 1
 - e. 5 dan 2
5. Santi adalah pegawai Kantor Desa Pucang Anom yang berkerja sebagai akuntan desa. Pada akhir bulan selalu dilakukan pengecekan kembali dana yang tertera dalam catatan dan dana secara fisik. Beberapa pos rekening yang dibukukan oleh Santi sesuai dengan bukti transaksi maupun dokumen sumber terkait. Berikut sejumlah pos rekening hasil pembukuan di akhir bulan:

Kas di tangan	Rp56.000.000,00	Utang bunga	Rp4.000.000,00
Kas di bank	Rp249.876.000,00	Uang muka KUD	Rp7.986.000,00
Piutang	Rp8.900.000,00	Utang beban	Rp5.600.000,00
Utang PFK	Rp13.765.000,00		
Persediaan	Rp43.700.000,00		

Dari jumlah diatas apabila saldo untuk cadangan piutang dan cadangan persediaan ditambah sebagai bagian dari pos ekuitas dana lancar, maka jumlah yang dicatat santi dalam ekuitas dana setelah pengurangan asset lancar dan kewajiban jangka pendek adalah sebesar ...

- Rp67.890.000,00
 - RP52.600.000,00
 - Rp47.650.000,00
 - Rp31.890.000,00
 - Rp44.650.000,00
6. Pada awal periode, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menerima pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp65.800.000,00. Pengakuan pendapatan yang ditangguhkan tersebut harus direklasifikasi berdasarkan basis kas untuk mengakui penyetoran pendapatan ke Kas daerah. Jurnal balik yang harus dibuat oleh akuntan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo adalah ...
- | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| a. Pendapatan yang ditangguhkan | Rp65.800.000,00 | |
| Kas di bendahara penerimaan | | Rp65.800.000,00 |
| b. Kas di bendahara penerimaan | Rp65.800.000,00 | |
| Pendapatan yang ditangguhkan | | Rp65.800.000,00 |
| c. Kas di bendahara pengeluaran | Rp65.800.000,00 | |
| Pendapatan | | Rp65.800.000,00 |
| d. Pendapatan | Rp65.800.000,00 | |
| Kas umum daerah | | Rp65.800.000,00 |
| e. Kas umum daerah | Rp65.800.000,00 | |
| Pendapatan yang ditangguhkan | | Rp65.800.000,00 |
7. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Berikut yang bukan termasuk karakteristik investasi jangka pendek adalah...
- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan
 - Ditujukan dalam rangka manajemen kas
 - Berisiko rendah
 - Dimiliki secara berkelanjutan
 - Ditujukan dalam rangka pemenuhan barang modal

8.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	NSS: A SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA				
Nomor SPM : 00068 Tanggal : 12-06-2019 Satker : 432570 KANTOR PERTANIAN KOTA SURABAYA	Dari : Bendahara Umum Negara Tanggal : 23-06-2019 Nomor : 801867L/ 670/113 Tahun Anggaran: 2019				
Klasifikasi Belanja 34115 Investasi barang modal					
Bank Pos : BRI CABANG WONOKROMO Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari bukti rekening nomor 0089-01-005636-35-1 sesuai dengan					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 30%;">Giro bank</td> <td style="width: 30%;">Uang sebesar</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Rp83.400.000,00</td> </tr> </table>		2	Giro bank	Uang sebesar	Rp83.400.000,00
2	Giro bank	Uang sebesar	Rp83.400.000,00		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">“DELAPAN PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH “</td> </tr> </table>		“DELAPAN PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH “			
“DELAPAN PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH “					
Kepada : Bendahara Pengeluaran Kantor Pertanian Kota Surabaya NPWP : 00.004.247.3-526.000 Nomor Rek. : 00340675404 Bank/Pos : PT. BNI (Persero) Cabang Darmo Surabaya Hal : Pembayaran pembelian mesin seri XCTY0080					

Diana menerima *copy* SP2D yang dibuat oleh Kantor Pertanian Kota Surabaya. Informasi yang benar dari bukti transaksi tersebut adalah ...

- a. Terjadi pembelian secara kredit barang modal mesin pertanian oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya pada tanggal 12 Juni 2019.
 - b. Terjadi penambahan nominal ekuitas dana lancar sebesar Rp83.400.000,00.
 - c. Pos ekuitas dana investadi-diinvestasikan dalam asset tetap bertambah sebesar Rp83.400.000,00.
 - d. Permintaan pemindahbukukan dari rekening Dinas Pertanian Kota Surabaya sebesar Rp83.400.000,00.
 - e. Mesin seri XCTY0080 adalah mesin pertanian yang dibuat dengan harga pokok dibawah Rp83.400.000,00
9. Jenis investasi jangka panjang yang dimasukkan untuk tidak dimiliki secara berkenanjutan adalah ...
- a. Investasi permanen
 - b. Investasi non permanen
 - c. Investasi cadangan
 - d. *Reclassifying*
 - e. Investasi dalam dana bergulir
10. Bapak sukarni pada tanggal 15 Oktober 2017 memenangkan sewa lelang sawah bengkok di Desa Tanjung Sari dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp95.000.000,00 untuk menebus 2 tahun pengelolaan sewa lelang sawah bengkok desa . Dari total tersebut sudah dibayar 70% di muka seminggu setelah pelelangan diselenggarakan. Dan sisanya baru dibayar pada tanggal 10 Oktober 2019. Jurnal

yang harus dicatat oleh akuntan Kantor Desa Tanjung Sari pada saat pembayaran tanggal 10 Oktober 2019 adalah ...

a. Kas	Rp28.500.000,00
Piutang	Rp28.500.000,00
b. Kas di bendahara penerimaan	Rp66.500.000,00
Piutang	Rp66.500.000,00
c. Ekuitas dana lancar-cadangan piutang	Rp28.500.000,00
Piutang	Rp28.500.000,00
d. Piutang	Rp66.500.000,00
Ekuitas adana lancar-cadangan piutang	Rp66.500.000,00
e. Piutang	Rp28.500.000,00
Kas di bendahara penerimaan	Rp22.500.000,00

11. Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 05 Februari 2019 mengeluarkan Perda tentang dana cadangan. Di dalam Perda disebutkan bahwa pembentukan dana cadangan sebesar 5% dari total APBN yang diterima. Total APBN yang tersedia sebesar Rp500.860.000,00. Pencatatan yang dibuat oleh pemerintah kota madiun dari dokumen sumber terkait adalah ...

a.

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet	Kredit
05 Feb 2019	10/KK/V /2018	Ekuitas dana investasi- dalam asset tetap	Rp25.043.000,00	
		Kas di bendahara Pengeluaran		Rp25.043.000,00

b.

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet	Kredit
05 Feb 2019	10/KK/V /2018	Ekuitas dana investasi- cadangan persediaan	Rp25.043.000,00	
		Kas di bendahara Pengeluaran		Rp25.043.000,00

c.

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet	Kredit
05 Feb 2019	10/KK/V /2018	Ekuitas dana cadangan- diinvestasikan dalam dana cadangan	Rp25.043.000,00	
		Dana cadangan		Rp25.043.000,00

d.

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet	Kredit
05 Feb 2019	10/KK/V /2018	Dana cadangan	Rp25.043.000,00	
		Ekuitas dana cadangan-diinvestasikan dalam dana cadangan		Rp25.043.000,00

e.

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet	Kredit
05 Feb 2019	10/KK/V /2018	Dana cadangan	Rp25.043.000,00	
		Ekuitas dana lancar-Cadangan persediaan		Rp25.043.000,00

12. Dalam ekuitas dana investasi diinvestasikan kepada aset lainnya terdapat beberapa pos. Berikut yang bukan merupakan pos ekuitas dana investasi untuk aset lainnya adalah ...

- a. Tanah
- b. Tagihan penjualan angsuran
- c. Obligasi
- d. Tagihan listrik
- e. Aset berwujud lainnya

13. Keripik pisang coklat hasil karya KKN mahasiswa Universitas Negeri Surabaya di Desa Rejoso Kabupaten Nganjuk dibutakan hak cipta dan hak paten masing-masing senilai Rp5.300.000,00 dan Rp7.000.000,00 dan dimasukkan dalam ekuitas dana investasi. Pencatatan yang dibuat oleh akuntan Desa Rejoso adalah ...

- a. Aset tak berwujud Rp12.300.000,00
Ekuitas dana investasi Rp12.300.000,00
- b. Aset berwujud Rp12.300.000,00
Ekuitas dana investasi-aset tetap Rp12.300.000,00
- c. Aset tak berwujud Rp12.300.000,00
Ekuitas dana investasi-aset lainnya Rp12.300.000,00
- d. Ekuitas dana investasi-aset tetap Rp12.300.000,00
Aset berwujud Rp12.300.000,00
- e. Ekuitas dana investasi Rp12.300.000,00
Aset tak berwujud Rp12.300.000,00

14. Ekuitas dana yang diatur dalam PSAP menyebutkan bahwa tuntutan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung/tidak langsung dari suatu perbuatan

melanggar hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya disebut dengan ...

- a. Tuntunan ganti rugi
- b. Tuntutan perbendaharaan
- c. Tuntutan pidana
- d. Kelalaian kerugian
- e. Kelalaian pidana

15. Sedangkan tuntutan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung/tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya disebut dengan ...

- a. Tuntunan ganti rugi
- b. Tuntutan perbendaharaan
- c. Tuntutan pidana
- d. Kelalaian kerugian
- e. Kelalaian pidana

16. Pemerintah Kota Banjar Negara bekerja sama dengan PT. Arjuna Art untuk pembangunan museum kabupaten. Pembangunan tersebut diselesaikan dengan nominal sebesar Rp429.700.000,00. Pencatatan yang benar untuk transaksi tersebut oleh Pemkot Banjar Negara ...

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| a. Kemitraan dengan pihak ketiga | Rp429.700.000,00 |
| Diinvestasikan dalam aset lainnya | Rp429.700.000,00 |
| b. BSK | Rp429.700.000,00 |
| Investasi dana tetap | Rp429.700.000,00 |
| c. Investasi dana tetap | Rp429.700.000,00 |
| Kas | Rp429.700.000,00 |
| d. BSK | Rp429.700.000,00 |
| Kas | Rp429.700.000,00 |
| e. Investasi dana tetap | Rp429.700.000,00 |
| Kemitraan dengan pihak ketiga | Rp429.700.000,00 |

17. Dalam neraca awal hal-hal yang dapat mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah kecuali ...

- a. Cadangan piutang
- b. Cadangan persediaan
- c. Saldo anggaran lebih
- d. Utang PFK
- e. Utang obligasi jangka panjang

18. Akibat adanya penilaian kembali aset tetap, Pemerintah Kabupaten Kediri memustuskan untuk menjual mobil box bekas pada tanggal 15 Juni 2019 karena sudah tidak dipergunakan lagi dengan harga Rp12.300.000,00. Hal tersebut berakibat

pada penurunan nilai ekuitas entitas terkait. Jurnal yang tepat untuk mencatat transaksi penjualan tersebut adalah ...

a.

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet	Kredit
15 Juni 2019	12/KM/V /2019	Asset tetap	Rp12.300.000,00	
		Ekuitas dana investasi- diinvestasikan dalam asset tetap		Rp12.300.000,00

b.

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet	Kredit
15 Juni 2019	12/KM/V /2019	Kas	Rp12.300.000,00	
		Ekuitas dana investasi- diinvestasikan dalam dana cadangan		Rp12.300.000,00

c.

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet	Kredit
15 Juni 2019	12/KM/V /2019	Ekuitas dana investasi- diinvestasikan dalam asset tetap	Rp12.300.000,00	
		Aset tetap		Rp12.300.000,00

d.

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet	Kredit
15 Juni 2019	12/KM/V /2019	Kas	Rp12.300.000,00	
		Aset tetap		Rp12.300.000,00

e.

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet	Kredit
15 Juni 2019	12/KM/V /2019	Kas	Rp12.300.000,00	
		Ekuitas dana investasi- diinvestasikan dalam asset tetap		Rp12.300.000,00

19.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	NSS: A SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA				
Nomor SPM : 00068 Tanggal : 12-06-2019 Satker : 432570 KANTOR K3LH KOTA SURABAYA	Dari : Bendahara Umum Negara Tanggal : 23-06-2019 Nomor : 801867L/ 670/113 Tahun Anggaran: 2019				
Klasifikasi Belanja 34115 Investasi barang modal					
Bank Pos : BRI CABANG WONOKROMO Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari bukti rekening nomor 0089-01-005636-35-1 sesuai dengan					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 40%;">Giro bank</td> <td style="width: 20%;">Uang sebesar</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Rp55.000.000</td> </tr> </table>		2	Giro bank	Uang sebesar	Rp55.000.000
2	Giro bank	Uang sebesar	Rp55.000.000		
"LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH "					
Kepada : Bendahara Pengeluaran Kantor Pertanian Kota Surabaya NPWP : 00.004.247.3-526.000 Nomor Rek. : 00340675404 Bank/Pos : PT. BNI (Persero) Cabang Darmo Surabaya Hal : Pelunasan belanja barang modal					

Dokumen sumber diatas berkaitan dengan transaksi ...

- a. Pembentukan dana cadangan
 - b. Pembelian aset tetap tunai
 - c. Investasi jangka panjang
 - d. Pembentukan dan yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang
 - e. Pembentukan dan yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek
20. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaa pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat disebut ...
- a. Ekuitas dana desa
 - b. Transfer dana desa
 - c. Dana desa
 - d. Dana alokasi umum
 - e. Dana alokasi khusus

BAB 3

Akuntansi Koreksi Kesalahan dan Peristiwa Luar Biasa

PETA KONSEP



Ruang Lingkup
Akuntansi Koreksi
Kesalahan

Perlakuan Akuntansi
Koreksi Kesalahan

Kebijakan Peristiwa
Luar Biasa

Akuntansi Koreksi Kesalahan

A. Pengertian Koreksi Kesalahan

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam bekerja manusia pasti pernah membuat kesalahan sekalipun pengerjaan tugas-tugasnya sudah dibantu dengan teknologi yang *modern*. Begitupun dengan akuntan pemerintahan, kesalahan pencatatan maupun pelaporan informasi akuntansi dan keuangan sering terjadi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), koreksi meru;akan suatu kegiatan pembetulan atas hal-hal yang kuang benar. Sedangkan kesalahan adalah penyajian pos-pos yang tidak sesuai dengan seharusnya dan berakibat pada informasi yang salah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntansi koreksi kesalahan adalah suatu tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian akun atau pos dalam transaksi akuntansi.

B. Penyebab terjadinya kesalahan

Berikut ini merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan akuntansi pemerintahan;

- a. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran.
- b. Kesalahan hitung.
- c. Kesalahan penerapan standart akuntansi.
- d. Kecurangan.
- e. Kelalaian, dll.

Selain kelima hal yang telah disebutkan, kesalahan juga dapat terjadi karena kelelahan yang dialami oleh pekerja. Maka dari itu, kondisi tubuh harus dijaga dengan baik. Pihak perusahaan juga harus memerhatikan keselamatan dan kesehatan para pekerja, sehingga produktivitas dan kinerja instansi dapat berjalan dan berkembang dengan baik.

C. Pencatatan koreksi kesalahan

a. Koreksi kesalahan yang tidak terulang

1. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang memengaruhi posisi kas maupun tidak dilakukan dengan cara pembetulan pada akun bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, pendapatan laporan operasional, dan beban.

➤ Contoh :

Pengampilan pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepda pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

Jurnal Awal:

➤ Jurnal LO dan neraca

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Kas di kas daerah	Rpxxx	
	Pendapatan hibah dari		Rpxxx

	pemerintah-LO		
--	---------------	--	--

➤ Jurnal LRA

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Perubahan SAL	Rpxxx	
	Pendapatan hibah dari pemerintah-LRA		Rpxxx

Jurnal Koreksi:

➤ Jurnal LO dan neraca

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Pendapatan hibah dari pemerintah-LO	Rpxxx	
	Kas di kas daerah		Rpxxx

➤ Jurnal LRA

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Pendapatan hibah dari pemerintah-LRA	Rpxxx	
	Perubahan SAL		Rpxxx

2. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

a) Koreksi saat laporan keuangan belum diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan.

Contoh:

Terjadi pengambilalihan belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji.

Jurnal Awal

➤ Jurnal LO dan Neraca

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Beban pegawai-LO	Rpxxx	
	RK-PPKD		Rpxxx

➤ Jurnal LRA

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Pegawai-LRA	Rpxxx	

	Perubahan SAL		Rpxxx
--	---------------	--	-------

Jurnal Koreksi:

➤ Jurnal LO dan Neraca

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Kas di kas daerah	Rpxxx	
	Pendapatan lainnya-LO		Rpxxx

➤ Jurnal LRA

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Perubahan SAL	Rpxxx	
	Pendapatan lainnya-LRA		Rpxxx

b) Koreksi saat laporan keuangan sudah diterbitkan

(1) Koreksi yang menambah kas

Koreksi kesalahan atau pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kebalikan belanja) yang tidak berulan dan terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut telah diterbitkan, maka pembetulan dapat dilakukan terhadap akun pendapatan lain-lain LRA.

Contoh:

Terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena adanya kelebihan salah penghitungan gaji.

Jurnal Awal:

➤ Jurnal LO dan Neraca

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Beban gaji pokok PNS-LO	Rpxxx	
	Kas di bendahara pengeluaran		Rpxxx

➤ Jurnal LRA

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Beban gaji pokok PNS-LRA	Rpxxx	
	Perubahan SAL		Rpxxx

Jurnal Koreksi:

➤ Jurnal LO dan Neraca

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Kas di kas daerah	Rpxxx	

	Ekuitas		Rpxxx
--	---------	--	-------

➤ Jurnal LRA

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
	Perubahan SAL	Rpxxx	
	Surplus-LRA		Rpxxx

b. Koreksi kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistematis merupakan kesalahan yang terjadi secara alamiah dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan terjadi secara berulang. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Contoh:

1. Pada tanggal 25 Mei 2018, DPPKAD menerima pendapatan pajak bulan dari Super Mall Surajaya sebesar Rp22.500.000,-. (asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

➤ Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
25 Mei 2018		Kas di kas daerah	Rp22.500.000,-	
		Pajak Mall-LO		Rp22.500.000,-

➤ Jurnal LRA

Tanggal	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
25 Mei 2018		Perubahan SAL	Rp22.500.000,-	
		Pajak Mall-LRA		Rp22.500.000,-

2. Pada tanggal 28 Mei 2018, atas penerimaan pajak Mall Surajaya Super terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp2.500.000,-

➤ Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
28 Mei 2018		Pajak Mall-LO	Rp2.500.000,-	
		Kas di kas daerah		Rp2.500.000,-

➤ Jurnal LRA

Tanggal	Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
28 Mei 2018		Pajak Mall-LRA	Rp2.500.000,-	
		Perubahan SAL		Rp2.500.000,-

Peristiwa luar biasa

Peristiwa luar biasa merupakan kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal biasanya dalam suatu entitas yang tidak diharapkan terjadi sehingga dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban entitas. Dalam lingkungan entitas pemerintahan, penanggulangan bencana alam dan sosial termasuk aktivitas luar biasa. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa tersebut terpenuhi apabila kejadian tersebut secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar belanja tak terduga atau dana darurat. Sehingga, memerlukan perubahan atau pergeseran anggaran secara mendasar.

Peristiwa luar biasa menggambarkan kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa, entitas pemerintah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial sering terjadi berulang. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan seperti berikut ini;

1. Tidak merupakan kegiatan atau aktivitas normal entitas.
2. Tidak diharapkan terjadi dan berulang.
3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas.
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Seperti halnya Pandemi *Covid-19* yang terjadi di awal tahun 2020 yang menyebabkan banyak perubahan anggaran yang mendasar. Keadaan darurat dan kejadian luar biasa ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pelaksanaannya, belanja tak terduga dalam APB Desa terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang disahkan oleh kepala desa. Dalam pengungkapan, hakikat, jumlah, dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

*Jangan malu bila miskin harta,
Malulah bila miskin ilmu berguna*

Kegiatan 1 Peserta Didik

1. Tugas Individu

Pada bulan Oktober 2018 Satker A membeli 25 perangkat komputer beserta perlengkapannya senilai Rp150.000.000,0. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Satker A adalah menerapkan penyusutan dengan metode garis lurus. Estimasi masa manfaat komputer tersebut 5 tahun dengan nilai penyusutan sebesar 20% per tahun. Dalam perjalanan waktu, pada 2019 Satker A memutuskan untuk mengubah kebijakan akuntansi penyusutan peralatan dan mesin dari metode garis lurus (*straight line method*) menjadi metode penyusutan saldo menurun (*double declining method*) dengan estimasi manfaat 5 tahun dan nilai penyusutan 40%.

Terhadap perubahan kebijakan akuntansi tersebut, diminta:

- a. Susunanlah perhitungan penyusutan sebelum dan sesudah kebijakan akuntansi mengalami perubahan!
- b. Analisislah kejadian yang terjadi apabila selisih terlalu tinggi atau terlalu rendah terhadap kedua metode perhitungan penyusutan yang digunakan!
- c. Bagaimanakah jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi yang bersangkutan?

2. Cara Pengerjaan

1. Tugas ini merupakan tugas individu
2. Sebelum mengerjakan tugas tersebut dalam lembar kegiatan yang telah disediakan, bacalah dengan teliti kasus yang terjadi.
3. Kasus ini berkaitan dengan koreksi kesalahan dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh suatu entitas.
4. Kerjakan di dalam lembar kegiatan yang telah disediakan.
5. Penghitungan dapat menggunakan kalkulator masing-masing dan disesuaikan dengan standar.
6. Apabila kurang paham dengan tugas tersebut, tanyakan kepada guru pengampu mata pelajaran terkait.

3. Lembar pengerjaan

Nama : Absen : Tugas :	<u>Nilai Individu</u>																																																								
<p>a. Penghitungan penyusutan dengan metode garis lurus</p> <p>Jawaban:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr style="background-color: #d9ead3;"><th>Tahun</th><th>Perhitungan</th><th>Nilai disusutkan</th><th>Nilai Buku</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> <p>b. Penghitungan penyusutan dengan metode saldo menurun</p> <p>Jawaban:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr style="background-color: #d9ead3;"><th>Tahun</th><th>Perhitungan</th><th>Nilai disusutkan</th><th>Nilai Buku</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>		Tahun	Perhitungan	Nilai disusutkan	Nilai Buku																									Tahun	Perhitungan	Nilai disusutkan	Nilai Buku																								
Tahun	Perhitungan	Nilai disusutkan	Nilai Buku																																																						
Tahun	Perhitungan	Nilai disusutkan	Nilai Buku																																																						

Kegiatan 2 Peserta Didik

A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan memilih satu jawaban yang paling tepat!

1. Sesuai dengan SAP, jurnal koreksi untuk penerimaan kembali kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak oleh wajib pajak adalah ...
 - a. Menambah pendapatan LRA apabila kurang bayar
 - b. Menambah Pendapatan LO apabila lebih bayar
 - c. Tidak berakibat pada akun beban dan pendapatan
 - d. Mengurangi Kas di daerah apabila lebih bayar
 - e. Mengurangi kas di daerah apabila kurang bayar
2. Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang. Koreksi ini dapat terjadi pada periode berjalan maupun pada periode-periode sebelumnya. Jenis koreksi kesalahan sesuai dengan ciri-ciri di atas adalah ...
 - a. Koreksi kesalahan yang tidak berulang
 - b. Koreksi kesalahan fiscal
 - c. Koreksi kesalahan sistematis
 - d. Koreksi kesalahan berulang
 - e. Koreksi kesalahan berulang periode bersangkutan
3. Berikut yang bukan merupakan penyebab terjadinya kesalahan adalah ...
 - a. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran
 - b. Salah hitung
 - c. Kelalaian
 - d. Kesesuaian dengan SAP
 - e. Ketidaksihonestan dalam memilih metode pencatatan
4. Jika terjadi penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, maka jurnal koreksi yang dilakukan untuk LRA jika laporan keuangan telah diterbitkan adalah...
 - a. Kas di kas daerah
 Pendapatan gaji
 - b. Perubahan SAL
 Surplus/deficit LRA
 - c. Perubahan SAL
 Dana alokasi Umum-LRA
 - d. Kas di kas daerah
 Ekuitas
 - e. Beban pokok gaji-LRA
 Kas di bendahara pengeluaran

5. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan SKPD adalah seperti di bawah ini, kecuali ...
- PPK-SKPD
 - PA
 - KPA
 - Pengguna Anggaran
 - PPKD
6. Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun-akun ...
- Kas, Pendapatan Lain-lain-LRA, dan Pendapatan Lain-lain-LO.
 - Pendapatan dan belanja
 - Pendapatan LRA dan pendapatan LO
 - Kas, Pendapatan LO, dan beban
 - Beban, Belanja, dan Kas
7. Thomas adalah akuntan Dinas Peternakan Kabupaten Siolamu. Pada tanggal 23 Agustus 2017 dibayar untuk pembelian alat pencabut bulu ayam dengan menerbitkan SP2D-LS sebesar Rp53.600.000,-. Pada hari dan tanggal yang sama, Thomas membukukan SP2D-LS tersebut dengan nominal Rp56.300.000,-. Jurnal koreksi LO dan neraca yang harus dibuat akibat salah penghitungan oleh Thomas adalah ...
-

Tgl	No. Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
23 Ags 2017	XXX	XXX	Belanja gaji-LO	Rp53.600.000	
			Perubahan SAL	Rp2.700.000	
			Kas di daerah		Rp56.300.000

b.

Tgl	No. Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
23 Ags 2017	XXX	XXX	Belanja gaji-LRA	Rp53.600.000	
			Perubahan SAL	Rp2.700.000	
			RK-PPKD		Rp56.300.000

c.

Tgl	No. Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
23 Ags 2017	XXX	XXX	Kas di bendahara pengeluaran	Rp2.700.000	
			Beban persediaan ATK-LO	Rp53.600.000	
			Beban cetak-LO		Rp56.300.000

d.

Tgl	No. Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
23 Ags 2017	XXX	XXX	Kas di kas daerah	Rp2.700.000	
			Perubahan SAL	Rp53.600.000	
			Beban cetak-LO		Rp56.300.000

e.

Tgl	No. Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
23 Ags 2017	XXX	XXX	Kas di bendahara pengeluaran	Rp53.600.000	
			Beban persediaan ATK-LO	Rp2.700.000	
			Beban cetak-LO		Rp56.300.000

8. Diterima kembali atas kelebihan pembayaran gaji PNS senilai Rp2.400.000,-. Sesuai dengan pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 maka jurnal koreksi untuk LRA yang harus dibuat adalah ...

- a. Perubahan SAL Rp2.400.000,-
 Surplus/deficit LRA Rp2.400.000,-
- b. Kas di daerah Rp2.400.000,-
 Perubahan SAL Rp2.400.000,-
- c. Kas di daerah Rp2.400.000,0
 Ekuitas Rp2.400.000,-
- d. Ekuitas Rp2.400.000,-
 Surplus/deficit LRA Rp2.400.000,-
- e. Perubahan SAL Rp2.400.000,-
 Ekuitas Rp2.400.000,-

9. Dalam pelaksanaannya, belanja tak terduga dalam APB Desa terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang disahkan oleh ...

- a. PA
- b. Bendahara desa
- c. Kepala desa
- d. Bupati/Wali Kota
- e. PPKD

10. Pada tanggal 10 Maret 2017 dibeli peralatan kantor seharga Rp313.000.000,- oleh Pemda Kabupaten Palaraya. Pada tanggal yang sama telah dibukukan dengan nominal sebesar Rp331.000.000,-/ jurnal koreksi yang harus dibuat oleh akuntan Pemda Kabupaten Palaraya adalah ...

- a. Perubahan SAL Rp18.000.000,-
 SiLKA Rp18.000.000,-
- b. Peralatan Kantor Rp18.000.000,-

	Kad di kas daerah	Rp18.000.000,-
c.	Peralatan kantor	Rp18.000.000,-
	Kas di bendahara pengeluaran	Rp18.000.000,-
d.	Kas di kas daerah	Rp18.000.000,-
	Peralatan kantor	Rp18.000.000,-
e.	SiLPA	Rp18.000.000,-
	Kas di kas daerah	Rp18.000.000,-

11. Jika mempengaruhi posisi Kas, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan LO atau akun Beban. Hal tersebut dilakukan apabila laporan keuangan ...

- Belum diterbitkan
- Telah diterbitkan
- Telah diserahkan kepada manager keuangan
- Belum diserahkan kepada manager keuangan
- Pos neraca mengalami kesalahan

12. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau SAP yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Hal tersebut merupakan kebijakan akuntansi yang tertuang pada ...

- PSAP Nomor 15 paragraf 27
- PSAP Nomor 10 paragraf 27
- PSAP Nomor 10 paragraf 26
- PSAP Nomor 15 paragraf 26
- Permendagri Nomor 10 Tahun 2013

13. Hal-hal yang tidak tercakup dalam perubahan kebijakan akuntansi adalah..,

- Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara konstan mempengaruhi laporan keuangan.
- Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara variabel mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan.
- Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya.
- Pengalihan pos-pos akuntansi secara konstan.
- Revaluasi asset

14. Berikut ini yang bukan merupakan persyaratan kejadian yang dikategorikan sebagai peristiwa luar biasa adalah ...

- Berada di luar kendali atau pengaruh entitas
- Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran
- Tidak merupakan kegiatan normal entitas

- d. Tidak diharapkan terjadi dan terulang
 e. Tidak bersifat sukar untuk diantisipasi
15. Pada tanggal 4 April 2018 Diterima kembali pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp9.800.000,- yang dikirim pada 17 Februari tahun 2018 karena kesalahan pengiriman yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang seharusnya diterima sebesar Rp67.000.000,-. Jurnal koreksi untuk jurnal laporan operasional dan neraca yang dibuat oleh pemerintah daerah adalah ...
- a. Perubahan SAL Rp67.000.000,-
 Pendapatan hibah Rp67.000.000,-
- b. Kas di kas daerah Rp9.800.000,-
 Pendapatan hibah-LO Rp9.800.000,-
- c. Kas di kas daerah Rp67.000.000,-
 Pendapatan hibah-LO Rp67.000.000,-
- d. Pendapatan hibah-LO Rp9.800.000,-
 Perubahan SAL Rp9.800.000,-
- e. Kas di kas daerah Rp9.800.000,-
 Surplus/deficit Rp9.800.000,-
16. Maeve pada tanggal 15 Maret 2017 mencatat transaksi atas pembelian ATK dengan SP2D-LS sebesar Rp7.600.000,-. Pada hari dan tanggal yang sama, bagian logistic melakukan penghitungan secara fisik ATK yang baru saja dibeli dengan jumlah Rp6.700.000,-. Jurnal koreksi LO dan neraca yang harus dibuat akibat salah penghitungan oleh Thomas adalah ...

a.

Tgl	No. Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
15 Mar 2017	XXX	XXX	Belanja gaji-LO	Rp6.700.000	
			Perubahan SAL	Rp900.000	
			Kas di daerah		Rp7.600.000

b.

Tgl	No. Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
15 Mar 2017	XXX	XXX	Belanja gaji-LRA	Rp6.700.000	
			Perubahan SAL	Rp900.000	
			RK-PPKD		Rp7.600.000

c.

Tgl	No. Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
15 Mar 2017	XXX	XXX	Kas di bendahara pengeluaran	Rp900.000	
			Beban persediaan ATK-LO	Rp6.700.000	
			Beban cetak-LO		Rp7.600.000

d.

Tgl	No. Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
15 Mar 2017	XXX	XXX	Kas di kas daerah	Rp900.000	
			Perubahan SAL	Rp6.700.000	
			Beban cetak-LO		Rp7.600.000

e.

Tgl	No. Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
15 Mar 2017	XXX	XXX	Kas di bendahara pengeluaran	Rp6.700.000	
			Beban persediaan ATK-LO	Rp900.000	
			Beban cetak-LO		Rp7.600.000

17. Akibat adanya pandemic *covid-19* yang melanda seluruh dunia pada awal tahun 2020. Pemerintah pusat memberikan bantuan langsung tunai kepada pemerintah desa untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdampak *covid-19* tersebut. Pemerintah desa Gandu Kecamatan Sukorejo memberkan bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp78.000.000,- pada kuartal kedua untuk tiga belas kepala keluarga. Berhubung alokasi untuk BLT-DD kuartal ekdua dari pemerintah pusat belum turun, maka Pemerintah Desa Gandu menggunakan dana darurat untuk menutupi dana yang belum turun tersebut. Rincian anggaran biaya untuk kejadian ini telah disahkan oleh kepala desa Gandu. Kejadian seperti hal tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan bagian ...

- Laporan realisasi anggaran
- Laporan operasional
- Laporan posisi keuangan
- Laporan laba/rugi
- Catatan atas laporan keuangan

18. Jika mempengaruhi posisi Kas, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan LO atau akun Beban. Hal tersebut dilakukan apabila laporan keuangan ...

- Belum diterbitkan
- Telah diterbitkan
- Telah diserahkan kepada manager keuangan
- Belum diserahkan kepada manager keuangan
- Pos neraca mengalami kesalahan

19. Jurnal LO dan neraca

Tgl	No. Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
10 Mar 2018	XXX	XXX	Kas di bendahara pengeluaran	Rp900.000	
			Beban persediaan ATK-LO	Rp5.600.000	
			Beban cetak-LO		Rp6.500.000

Jurnal LRA

Tgl	No. Bukti	Kode Rek.	Uraian	Debet	Kredit
10 Mar 2018	XXX	XXX	Belanja ATK-LRA	Rp5.600.000	
			Perubahan SAL	Rp900.000	
			Beban cetak-LRA		Rp6.500.000

Jeashon sebagai akuntan SKPD Z telah membuat jurnal koreksi seperti yang terlihat pada jurnal di atas. Dari jurnal tersebut kesalahan yang dibuat oleh Jeashon adalah ...

- a. Kesalahan belanja cetak yang seharusnya Rp6.500.000 dicatat sebesar Rp5.600.000 sebagai belanja ATK dengan menggunakan mekanisme UP/GU.
 - b. Kesalahan belanja cetak yang seharusnya Rp5.600.000 dicatat sebesar Rp6.500.000 sebagai belanja ATK dengan menggunakan mekanisme UP/GU.
 - c. Kesalahan belanja ATK yang seharusnya Rp5.600.000 dicatat sebesar Rp6.500.000 sebagai belanja cetak dengan menggunakan mekanisme LS.
 - d. Pembelian ATK sebesar Rp6.500.000,- dicatat sebesar Rp5.600.000,- dengan mekanisme LS.
 - e. Pembelian biaya cetak sebesar Rp6.500.000,- dicatat sebesar Rp5.600.000,- dengan mekanisme LS.
20. Salah satu koreksi kesalahan transaksi yang berakibat pada bertambahnya kas di pemerintah daerah adalah ...
- a. Pembayaran belanja pegawai sebesar Rp67.900.000,- dicatat sebesar Rp57.900.000,-
 - b. Pembayaran atas pembelian ATK sebesar Rp5.000.000,- dan diretur kembali sebesar Rp2.000.000
 - c. Pengembalian belanja pegawai tahun lalu sebesar Rp4.800.000,-
 - d. Pengembalian pendapatan DAU karena adanya kesalahan hitung oleh pemerintah daerah.
 - e. Pembayaran atas pajak restoran yang dibangun di tanah pemerintah daerah sebesar Rp5.700.000

Daftar Pustaka

- Arifin, Zainal. (2014). *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- BSNP. (2014a). *Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran SMA/MA Komponen Kelayakan Kegrafikan*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.
- BSNP. (2014b). *Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran Tahun 2014 Kelompok Peminatan Ekonomi*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Daryanto. (2014). *Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Gava Media.
- Depdiknas. (2008). *Panduan Pembelajaran Bahan Ajar*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). *PSAP No.09 Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas Dana*. Jakarta. KSSP
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). *PSAP No.10 Koreksi Kesalahan Fiskal, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa*. Jakarta. KSSP
- Sondi Putra, Iswahyudi. Nordiawan, Deddi. Rahmawati, Maulidah. (2019). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widayati, Wulan. 2019. *Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintahan Untuk SMK/MAK Kelas XII*. Surakarta: Putra Nugraha.

Identitas Penulis



Sayekti Winarsih adalah perempuan kelahiran Ngawi, 14 November 1997. Telah menyelesaikan pendidikan di SDN Karangsono 03, SMPN 1 Kwadungan, SMK Negeri 1 Ngawi, dan sekarang tengah menempuh pendidikan strata 1 di Program Studi Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Surabaya angkatan 2016.



